

Judul : Optimalkan pungutan pajak, sistem coretax disarankan dikoreksi
Tanggal : Kamis, 09 April 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Optimalkan Pungutan Pajak

Sistem Coretax Disarankan Dikoreksi

ANGGOTA Komisi XI DPR Anis Byarwati meminta evaluasi menyeluruh sistem Coretax dan *Compliance Risk Management* (CRM) guna meningkatkan penerimaan negara. Peningkatan mendalam diharapkan mampu mengoptimalkan performa instansi dalam memungut pajak secara efektif.

Menurut Anis, transformasi digital lewat Coretax merupakan langkah strategis. Namun, efektivitasnya harus diukur dari kemampuan menjangkau sektor *shadow economy* atau aktivitas ekonomi bawah tanah. Sektor ini belum terjamah sistem perpajakan dan menjadi tantangan besar dalam memperluas basis pajak nasional.

Modernisasi sistem perpajakan tidak boleh berhenti pada aspek teknologi semata. Penerapan teknologi canggih itu harus memberikan dampak langsung bagi stabilitas ekonomi negara melalui pemerataan kontribusi pajak. "Inovasi ini harus mampu menghadirkan keadilan fiskal dengan memperluas basis pajak secara nyata," terang Anis.

Terkait capaian aktivasi Coretax yang mencapai 17 juta hingga Maret 2026, Anis mengingatkan

Pemerintah agar tidak lengah terhadap kendala teknis di lapangan. Stabilitas sistem dan infrastruktur digital perlu dijaga guna menjamin kelancaran proses pelaporan bagi wajib pajak.

Optimalisasi teknologi Coretax dan CRM, sambungnya, harus diarahkan guna meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Upaya itu bertujuan menekan potensi *shortfall* penerimaan di masa depan. Semangat reformasi jangan sampai menambah beban administratif bagi masyarakat maupun para pelaku usaha nasional.

Dia juga meminta Pemerintah mengkaji rekomendasi Bank Dunia terkait penyesuaian ambang batas PPN dan PPh Badan. Langkah itu harus mempertimbangkan kondisi ekonomi domestik serta daya tahan UMKM. "Pendekatan reformasi pajak tidak bisa disamaratakan demi menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan stabilitas ekonomi," katanya.

Selanjutnya, dia menyoroti proyeksi *Fitch Ratings* yang memperkirakan rasio pendapatan Pemerintah Indonesia hanya 13,3 persen pada 2026-2027. Angka itu masih di bawah rata-rata ne-



Anis Byarwati

gara berperingkat BBB. Meningkatnya ketidakpastian fiskal serta revisi prospek utang jadi negatif harus segera mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah.

Kondisi itu berpotensi memperlebar defisit anggaran hingga kisaran 2,9 persen dari Produk Domestik Bruto pada 2026. Pemerintah harus melakukan terobosan kebijakan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak secara berimbang. Kepatuhan sukarela perlu diperkuat guna memastikan kebijakan fiskal yang inklusif serta berkeadilan bagi rakyat.

Senada, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan agar masalah Coretax jangan mengorbankan *tax ratio*. Masalah yang ada bukan sekadar transisi teknologi, tapi kelemahan perencanaan dan eksekusi. Reformasi perpajakan adalah agenda strategis yang tidak boleh gagal karena lemahnya manajemen hingga kesalahan desain sistem.

Dia mengingatkan, pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bahwa ada persoalan desain dan kompleksitas Coretax mestinya jadi pintu masuk koreksi besar. Jangan sampai perbaikan sekadar tambal sulam yang berpotensi memperpanjang masalah. Digitalisasi pajak itu bukan hanya soal *software*, tapi soal perubahan sistem kerja negara.

Menurutnya, ada risiko kinerja penerimaan negara terganggu gara-gara turunnya kepatuhan sukarela wajib pajak imbas turunnya kepercayaan pada sistem. "Kalau wajib pajak mengalami kesulitan administratif, efeknya bisa langsung ke *compliance*. Kalau itu terganggu, penerimaan negara juga berisiko," ujarnya.

Sebelumnya, Purbaya mengakui sistem Coretax masih menghadapi berbagai persoalan sejak tahap perancangan awal dan mencurigai desainnya dibuat terlalu rumit sehingga membuka ruang agar ada bisnis. Kendala perangkat lunak serta integrasi aplikasi pihak ketiga juga dinilai membuat layanan menjadi lambat dan sulit digunakan.

Dia mengatakan, desain Coretax kurang ramah bagi pengguna umum, sehingga membuka ruang bagi perantara berupa joki atau perangkat penghubung. Kesulitan penggunaan dianggap mendorong munculnya pihak yang menjembatani wajib pajak dengan sistem layanan perpajakan berbasis web yang terasa rumit bagi masyarakat awam.

Dia memastikan, Pemerintah akan segera memperbaiki sistem Coretax untuk menutup celah praktik perijokian. Saat ini, waktunya memang terlalu pendek untuk memperbaiki sistem layanan pajak itu, apalagi dia baru mengetahui persoalan tersebut. "Tapi ke depan kita perbaiki supaya nggak ada joki lagi," tandas Purbaya. ■ **PYB**